



GARUDA INDONESIA JALIN KERJA SAMA DENGAN IKATAN ALUMNI ITB

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiawati bersama dengan Ketua Umum IA ITB Gembong Primadja memperlihatkan MoU Kesepahaman Perjanjian Kerja sama Corporate Privilege Penajakan layanan komersial di kantor pusat Garuda Indonesia, Selasa (27/9). Garuda Indonesia akan sinergi bersama Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) untuk memaksimalkan potensi kedua entitas khususnya melalui penyediaan konektivitas udara bagi seluruh anggota IA-ITB melalui berbagai added value yang dihadirkan melalui kerja sama Corporate Privilege.

Menkeu: APBN Harus Tetap Menjadi Instrumen yang Diandalkan dan Dioptimalkan

Sri Mulyani menilai, keputusan untuk melakukan konsolidasi fiskal ini merupakan keputusan yang antisipatif dan strategis. Selain itu, Pemerintah akan sangat waspada terhadap pengelolaan defisit dan pembiayaan utang tersebut.

JAKARTA (IM) – Pemerintah dan DPR RI telah mencapai kesepakatan atas postur maupun draft Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal ini, Pemerintah bersama dengan DPR juga bersepakat menetapkan UU APBN TA 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara agar semakin kuat menghadapi guncangan di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi seluruh masyarakat.

“Dengan konteks ini, kita menyadari bahwa penyusunan APBN 2023 harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan dan dioptimalkan, baik di dalam menahan berbagai shock yang terjadi, agar kita

bisa terus melindungi rakyat kita dari sisi daya beli mereka dan melindungi perekonomian kita agar tetap bisa momentum pemulihan berjalan. Namun di dalam menjalankan tugas melindungi rakyat dan melindungi ekonomi, APBN tetap juga harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR terkait Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2023 di Jakarta, Selasa (27/9), seperti dikutip dari laman Kemenkeu, Rabu (28/9).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa DPR bersama Pemerintah telah menyepakati pelaksanaan konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Berdasarkan laporan panitia kerja mengenai asumsi dan defisit APBN, diketahui bahwa defisit disepakati kembali tu-

run dibawah 3% sebagaimana UU Keuangan Negara yakni 2,84%, sesudah tiga tahun di hadapkan pandemi dan memiliki konsekuensi menyebabkan defisit melonjak.

Sri Mulyani menilai, keputusan untuk melakukan konsolidasi fiskal ini merupakan keputusan yang antisipatif dan strategis. Selain itu, Pemerintah akan sangat waspada terhadap pengelolaan defisit dan pembiayaan utang tersebut.

“Dengan kenaikan suku bunga dan juga gejolak sektor keuangan serta nilai tukar, maka defisit yang lebih rendah memberikan potensi keamanan bagi APBN dan perekonomian kita,” jelasnya.

Sementara itu dari sisi postur APBN, pendapatan negara diproyeksikan akan mencapai Rp2.463 triliun. Menurut Sri Mulyani, ini merupakan angka

yang mungkin dianggap aman jika dilihat dari realisasi penerimaan tahun ini. Namun di sisi lain, ia menyampaikan Pemerintah harus membuat mekanisme untuk mengamankan pendapatan negara baik dari sisi pajak, bea keluar, dan penerimaan negara bukan pajak apabila gejolak komoditas menyebabkan harga komoditas tidak setinggi yang diasumsikan.

Sedangkan pada sisi belanja negara tahun 2023 mencapai Rp3.061,2 triliun. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung persiapan tahapan Pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara, dan penyelesaian proyek infrastruktur strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian.

Sebagai akhir penyampaian pendapat sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan

RUU APBN TA 2023, Sri Mulyani juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada DPR untuk kerja sama yang baik selama pembahasan RUU ini. Ia berharap agar Pemerintah dan DPR terus bersinergi dan menjalin hubungan baik demi menjaga APBN.

“Menyadari bahwa dinamika global masih akan berlangsung, kami dengan rendah hati memohon kepada DPR untuk terus menjaga hubungan baik, agar kami bersama-sama dengan DPR mampu terus menjaga APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam menjaga masyarakat dan perekonomian. Fleksibilitas APBN tetap diperlukan namun tetap akuntabel,” kata Sri Mulyani. • dot

Ekonomi Sirkular Berpotensi Hasilkan PDB hingga Rp638 Triliun

JAKARTA (IM) - Ekonomi sirkular, yakni daur ulang sampah diperkirakan memiliki potensi menghasilkan produk domestik bruto (PDB) sebanyak Rp569 triliun hingga Rp638 triliun pada 2030.

Kasub Direktorat Prasarana dan Jasa Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Edward Nixon Pakpahan juga menyebutkan lewat ekonomi sirkular, Indonesia berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

“Ekonomi sirkular punya masa depan yang sangat cerah di Indonesia. Selain punya nilai ekonomi tinggi, bisnis sirkular dengan penekanan daur ulang sampah plastik dan non-plastik, juga bermanfaat besar pada lingkungan,” kata Nixon melalui keterangan tertulis

di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (28/9).

Sebagai negeri yang punya reputasi global sebagai penghasil sampah nomor dua di dunia, tambahnya, stigma negatif itu sebenarnya punya potensi besar untuk diubah jadi lebih positif dan menguntungkan.

Dengan menggerakkan ekonomi sirkular yang menitikberatkan pada daur ulang sampah, maka sampah bukan lagi dilihat sebagai persoalan, tapi akan dipandang sebagai sumber daya ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Manfaat besar ini terutama dari berkurangnya limbah di setiap sektor usaha hingga sebesar 18-52 persen pada 2030. Manfaat ekonomi sirkular dari bisnis pendaurulangan sampah berpotensi menghasilkan tambahan PDB sebesar Rp593-Rp638 triliun dari lima sektor usaha pada

2030,” katanya.

Nixon menyebutkan, saat ini sampah yang dikelola bank sampah per tahun masih relatif kecil, artinya masih banyak peluang ekonomi yang bisa dimaksimalkan. Persentase jumlah nasabah di bank sampah didominasi nasabah dari kaum perempuan sebesar 64 persen sedangkan laki-laki 36 persen.

Sementara untuk pertumbuhan jumlah nasabah di bank sampah ada kenaikan pada 2020 yakni mencapai angka 419,204, tetapi kemudian turun pada 2021 di angka 377,881 karena pengaruh Covid.

“Meski demikian, patut dicatat, gagasan UMKM untuk realisasi konkret ekonomi sirkular pengelolaan sampah, harus tetap dibarengi dengan idealisme, komitmen, dan konsistensi, barulah kemudian disusul bicara rupiah,” kata Nixon. • pan

Pemerintah Ajak Pengusaha Korsel Garap Potensi Mineral di Indonesia

JAKARTA (IM) - Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri sektor ESDM Agus Tjahjana Wirakusumah mengajak pengusaha Korea Selatan (Korsel) untuk turut menggarap peluang investasi hilirisasi di Indonesia menyusul potensinya yang melimpah. “Indonesia memiliki potensi sumber daya mineral yang besar, yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kami mengundang para pengusaha untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan nilai tambah untuk pengembangan ke depan, seperti baterai dan storage (penyimpanan),” kata Agus dalam Indonesia-Korea Future Industry Business Plaza 2022 yang digelar di Jakarta, Rabu (28/9).

Seperti dilansir Antara, Agus menuturkan Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin kerja sama di bidang energi dan mineral yang telah ditandatangani pada tahun 2002.

Kedua negara memiliki berbagai potensi kerja sama di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan mineral. Salah satu kerja sama yang telah disepakati adalah pilot project charging system untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Agus mengatakan, Indonesia juga telah menjalin kerja sama untuk menggarap pengembangan critical mineral (mineral kritis), khususnya bertukar informasi pengelolaan sumber daya mineral kritis.

Dalam kesempatan yang sama, President of Southeast

Asia-Oceania Head Office KOTRA Jongseob Lee berharap hubungan antara Korea Selatan dengan Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara, bisa terus terjalin erat dan berkembang.

Lee menilai jelang 50 tahun hubungan Indonesia-Korea, nilai perdagangan kedua negara telah meningkat hingga 100 kali lipat. Semua itu, kata dia, dapat dicapai dengan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. “Menjelang 50 tahun Indonesia-Korea, kerja sama ekonomi kedua negara akan membuka halaman baru,” katanya.

Sementara itu Direktur Jenderal KOTRA Jakarta Janghee Lee mengatakan pihaknya berperan menjadi jembatan bagi perusahaan Korea Selatan dan perusahaan Indonesia untuk menjalin kerja sama ekonomi, terutama di bidang ekspor, impor, dan investasi.

“Korea Selatan akan melanjutkan kolaborasi yang melibatkan industri dengan teknologi tinggi seperti kendaraan listrik dan baterai sekunder sebagai bagian dari Environmental Social Governance (ESG) untuk mendukung kebijakan keberlanjutan Indonesia,” kata Lee.

Indonesia merupakan salah satu mitra penting bagi Korea Selatan, khususnya di kawasan ASEAN. Nilai perdagangan Korea Selatan dan Indonesia tercatat sebesar US\$15,3 miliar pada Januari hingga Juli 2022. Angka tersebut tumbuh 49,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yakni US\$10,2 miliar. • hen



INDONESIA BUKUKAN KONTRAK DAGANG USD 138,2 JUTA

Indonesia membukukan kontrak dagang cangkang kernel kelapa sawit (palm kernel shell) untuk kebutuhan energi terbarukan Jepang dengan kontrak dagang bernilai USD 138,2 juta. Kesepakatan ini dilakukan melalui pertemuan bisnis (business meeting) dan penandatanganan kesepakatan dagang pada Senin (26/9) di Tokyo, Jepang.



BPR SUPRA

PULAUINTAN
General Contractor



PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

TOBA Investasi Rp7,5 Triliun untuk Sektor EBT

JAKARTA (IM) - PT/TBS Energi Utama Tbk (TOBA) akan berfokus pada sektor energi baru dan terbarukan (EBT), serta kendaraan listrik. Guna menjalankan komitmen tersebut, perseroan menargetkan untuk berinvestasi sebesar USD500 juta atau setara Rp7,5 triliun hingga 2025.

“Perseroan terus berupaya menjadi katalis bagi transisi menuju energi keberlanjutan di Indonesia, melalui ambisi mencapai *carbon neutrality* pada 2030,” kata Direktur Utama TOBA Dicky Yordan dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (28/9).

Dicky menjelaskan, untuk sektor energi terbarukan, perseroan terus melihat peluang dalam mencari proyek-proyek potensial dan aset *brownfield* atau operasional, dengan fokus pada proyek pembangkit listrik tenaga air, angin, tenaga surya.

TOBA melalui anak usahanya mengalami kemajuan positif dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH) berkapasitas 6 MW, serta *on-track* untuk mencapai *commercial operations data* (COD) pada Juni 2024.

Sementara itu, untuk sektor kendaraan listrik, perseroan akan terus melanjutkan uji coba *electricum* yang sudah berjalan dengan baik. Saat ini, TOBA sedang menyelesaikan penilaian rencana bisnis, serta mitra teknologi untuk peluncuran massal.

“Sebagai langkah awal,

kami telah mengukur dan melaporkan baseline emisi gas rumah kaca TBS untuk dimonitor setiap tahun hingga 2030 mendatang,” kata Dicky.

Lebih jauh ia menyebut bahwa perseroan akan memperkuat pondasi dalam mewujudkan komitmen pengembangan bisnis ke arah energi baru dan terbarukan.

Tahun ini, TOBA menargetkan belanja modal sebesar USD35 juta yang sebagian besar akan dialokasikan untuk bisnis kendaraan listrik dan bisnis energi terbarukan, yang sejalan dengan komitmen energi hijau perseroan.

Hingga semester I-2022, TOBA mencatatkan pendapatan sebesar USD279,5 juta. Angka itu naik 48% dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar USD188,8 juta.

Sejalan dengan pendapatan, laba bersih turut meningkat sebesar 70,7% menjadi sebesar USD51,2 juta hingga Juni 2022. Peningkatan pendapatan utamanya didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata (ASP) sebesar 82,5%, serta mulai beroperasinya PLTU Sulut-3 dan Sulbagut-1 secara penuh yang telah mencapai COD masing-masing pada bulan Juli dan Desember 2021.

Momentum pasar sepanjang 2022 juga berjalan beriringan dengan upaya perseroan, untuk mendoor ulang pendapatan dari bisnis berbasis bahan bakar fosil menjadi energi hijau. • dro

Kelola Obvitnas, PGN Perkuat Sistem Pengamanan

JAKARTA (IM) - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero) berkomitmen terus memperkuat sistem manajemen pengamanan di seluruh infrastruktur gas bumi, yang dikelola perusahaan dan masuk dalam klasifikasi obyek vital nasional (obvitnas) tersebut.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar mengatakan, komitmen penguatan security awareness maupun implementasi dalam sistem keamanan tersebut untuk menjaga keandalan seluruh infrastruktur gas bumi.

“Kami komit memperluas jaringan gas bumi di dalam negeri guna menyediakan energi yang efisien, bersih, aman dan mudah bagi masyarakat,” kata Achmad dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (28/9).

Direktur Teknologi dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra mengatakan *security awareness* sebagai salah satu wujud implementasi dari substansi sistem manajemen keselamatan migas (SMKM), yaitu adanya sistem manajemen pengamanan berbasis Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2019.

PGN memiliki dan mengoperasikan 95 persen pipa di industri hilir gas bumi nasional. Di samping itu, PGN Group juga mengambil peran proaktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam kegiatan konservasi melalui pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), yang untuk tahun 2022, PGN menargetkan 400.000 sambungan.

“Program jargas diharapkan dapat berkontribusi pada penghematan devisa dari pengalihan pipiji yang sebagian besar bahan bakunya masih impor dari negara lain. Dalam jangka menengah, program ini sekaligus upaya untuk mengisi

masa transisi menuju energi bersih atau energi baru terbarukan yang sudah menjadi komitmen global,” kata Achmad.

Ia melanjutkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gas bumi termasuk sektor rumah tangga di daerah atau kota yang belum ada pipa transmisi maupun distribusi gas, PGN merencanakan untuk penyaluran dengan skema beyond pipeline melalui berbagai mode pengangkutan.

Achmad juga menegaskan PGN terus menerapkan aspek keamanan mengingat sebagai satu entitas bisnis bergerak pada sektor pengelolaan migas, sehingga kegiatan bisnisnya memiliki risiko operasional yang tinggi.

Komitmen PGN dalam menerapkan sistem manajemen pengamanan di seluruh infrastruktur gas bumi mendapatkan apresiasi Brigjen Pol Suhendri selaku Dirpamobvit Korsabara Baharkam Polri.

Menurut Suhendri, PGN telah menjadi contoh sebagai pengelola obvitnas yang mengimplementasikan sistem manajemen pengamanan.

Saat ini, PGN Group mengoperasikan 11.142 km pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang melayani 759.371 pelanggan, terdiri atas 754.998 rumah tangga, 2.504 industri dan komersial, serta 1.869 pelanggan kecil di 63 kabupaten/kota.

Anak perusahaan maupun afiliasi juga mengelola infrastruktur bisnis lainnya yaitu storage dan regasifikasi LNG melalui FSRU di lepas pantai Lampung dan Laut Jawa, LNG hub di Arun, filling station dan cargo dock LNG, trucking LNG maupun CNG, mother station CNG, SPBG, MRS jargas, stasiun pengatur dan pembagi gas bumi, serta berbagai infrastruktur penunjang gas bumi lainnya di berbagai wilayah. • hen